

ABSTRAK

Nazilia Ahla. 210102030070. “*Peran Dan Evaluasi LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Dalam Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II*”, Skripsi, Pembimbing: Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan., M.Hum. Pada program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2026

Kata Kunci: LKBH Fakultas Syariah, Pos Bantuan Hukum, Akses Terhadap Keadilan, Pengadilan Agama Kapuas Kelas II.

Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi prinsip *equality before the law* bagi seluruh warga negara, termasuk Masyarakat kurang mampu. Namun dalam praktiknya, keterbatasan ekonomi dan rendahnya pemahaman hukum sering menjadi hambatan bagi masyarakat miskin dalam memperoleh akses keadilan. Oleh karena itu keberadaan lembaga bantuan hukum melalui penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di lingkungan peradilan menjadi sarana penting dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin merupakan salah satu lembaga yang berperan dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma melalui kerjasama dengan Pengadilan Agama Kapuas Kelas II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan evaluasi LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dalam penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap pengurus LKBH Fakultas Syariah, petugas Posbakum serta aparatur Pengadilan Agama Kapuas Kelas II. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode induktif.

Hasil penelitian menunjukka bahwa LKBH Fakultas Syariah berperan cukup signifikan dalam penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II, terutama dalam penyediaan petugas, pembinaan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Posbakum berkontribusi dalam membantu masyarakat pencari keadilan melalui layanan konsultasi hukum dan pembuatan dokumen perkara. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan anggaran, jarak lokasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta kualitas penyusunan dokumen belum optimal, sehingga diperlukan evaluasi dan peningkatan pembinaan berkelanjutan.

